



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.04/2015

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK
DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
DENGAN JAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN JAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
11. Penundaan adalah penundaan pembayaran:
 - a. bea masuk;
 - b. bea masuk dan PDRI; atau
 - c. bea masuk, cukai, dan PDRI,karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

BAB II PENUNDAAN

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan dengan tujuan Impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan diberikan Penundaan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan atau keringanan meliputi PDRI, Penundaan dapat juga diberikan atas pembayaran PDRI.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapat persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.
- (2) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan untuk mendapatkan Penundaan;
 - b. jumlah bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dimintakan Penundaan pembayaran;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. jumlah PDRI, dalam hal permohonan Penundaan meliputi PDRI; dan
 - d. jumlah dan jenis barang.
- (3) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk; dan
 - b. fotokopi *invoice* dan/atau *packing list* atau dokumen semacam itu.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas:
 - a. bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; dan
 - b. proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam hal permohonan Penundaan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN PENUNDAAN

Pasal 6

Importir yang telah mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean dengan mendapat Penundaan dan belum mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk, dapat diberikan perpanjangan Penundaan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, importir mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
- (3) Perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pasal 10

- (1) Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengeluarkan barang impor setelah menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor dan menyerahkan jaminan, ke Kantor Pabean.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan Penundaan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti penerimaan jaminan kepada importir yang telah menyerahkan jaminan.
- (5) Bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
- (6) Bentuk dan jangka waktu jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
- (7) Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), importir menyesuaikan jangka waktu jaminan yang telah diserahkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

- (1) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan dikirimkan.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan tidak berlaku apabila Pemberitahuan Pabean Impor disampaikan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan:
 - a. tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir; atau
 - c. bukti pengiriman secara elektronik.
- (4) Pelaksanaan penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan mendapat persetujuan pengeluaran barang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

BAB V

PENYELESAIAN PENUNDAAN

Pasal 12

- (1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan diselesaikan oleh importir dengan cara:
 - a. menyerahkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk; atau
 - b. menyerahkan surat penolakan permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 7 ayat (3) dan belum mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri:
 - a. mencairkan jaminan untuk penyelesaian bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang; dan
 - b. membuat penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal importir telah melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI sebelum jangka waktu keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk diterima dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan masih berada dalam jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean mengembalikan jaminan setelah importir mengajukan permohonan penarikan jaminan.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk diterima dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan melebihi jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, importir dapat diberikan pengembalian atas bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar.
- (5) Pengembalian atas PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (6) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk ditolak dan penolakannya masih dalam jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean:
 - a. mencairkan jaminan untuk penyelesaian atas bea masuk, bea masuk dan PDRI, atau bea masuk, PDRI, dan cukai yang terutang; dan
 - b. membuat penetapan atas pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk atau bea masuk dan cukai yang wajib dibayar yang dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan tanggal surat penolakan.
- (7) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk ditolak dan penolakannya melebihi jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean membuat penetapan atas pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk atau bea masuk dan cukai yang wajib dibayar yang dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 7 ayat (3).

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menatausahakan dokumen terkait Penundaan, pengeluaran atas barang impor, sampai dengan penyelesaian Penundaan ke dalam laporan penatausahaan Penundaan.
- (2) Kepala Kantor Pabean mengirimkan laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) semester kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan.
- (3) Laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak atau data elektronik.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan dan Penundaan diselesaikan.
2. Terhadap permohonan Penundaan yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*) yang belum diselesaikan, permohonan Penundaan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian Penundaan;
 - b. tata cara pemberian perpanjangan Penundaan; dan
 - c. tata cara penyelesaian Penundaan,
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1335

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.04/2015
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN
JAMINAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1)..... /KANTOR PELAYANAN UTAMA(2)...../
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(3).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(4).....

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN(5).....
KEPADA(6).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(6)..... telah mengajukan permohonan untuk
mendapatkan(7)..... atas(5)....., melalui
surat Nomor(8)..... kepada Menteri Keuangan melalui
.....(9).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang(10).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2014 tentang
Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran
Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG(10).....
- PERTAMA : Kepada(6)..... Nomor Pokok Wajib Pajak(11).....
yang beralamat di(12)..... diberikan penundaan
pembayaran(5)....., atas barang impor dengan data:
- a. Jumlah dan jenis barang :(13).....
- b. No. dan tgl. *Invoice* :(14).....
- KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA
diberikan selama(15)..... hari terhitung sejak tanggal
pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Menteri ini, akan diadakan perubahan seperlunya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(16).....
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
.....(17).....

dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR

.....(18).....

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang impor. Tidak perlu diisi dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : Diisi Bea Masuk, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, atau Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai (dipilih Penundaan yang dimohonkan).
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mendapat penundaan.
- Nomor (7) : Diisi pembebasan atau keringanan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan atau keringanan.
- Nomor (9) : Diisi Direktorat Fasilitas Kepabeanaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau bidang yang melayani fasilitas kepabeanaan pada Kantor Pabean.
- Nomor (10) : Diisi sesuai judul keputusan.
- Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi jumlah dan jenis barang.
- Nomor (14) : Diisi nomor dan tanggal *Invoice*
- Nomor (15) : Diisi jangka waktu penundaan, paling lama 60 (enam puluh) hari.
- Nomor (16) : Diisi Direktur Fasilitas Kepabeanaan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau Kepala Kantor Pabean tempat permohonan pembebasan atau keringanan diajukan (dipilih instansi yang menerbitkan fasilitas).
- Nomor (17) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean penerbit keputusan penundaan, dalam hal importasi melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (18) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167/PMK.04/2015
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN
JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1)..... /KANTOR PELAYANAN UTAMA(2)...../
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(3).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(4).....

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN(5).....
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(6).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(7)..... telah mendapat penundaan pembayaran(5)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6)..... dengan jangka waktu sampai dengan(8).....;
- b. bahwa(7)..... telah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan surat nomor(9).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang(10).....;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2014 tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG(10).....
- PERTAMA : Memberikan persetujuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(6)..... sampai dengan tanggal(11).....
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perubahan seperlunya.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.(12).....
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
.....(13).....
dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR

.....(18).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara. Tidak perlu diisi dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama.
- Nomor (4) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : Diisi tulisan Bea Masuk, Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, atau Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai (dipilih Penundaan yang dimohonkan).
- Nomor (6) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penundaan yang diperpanjang jangka waktunya.
- Nomor (7) : Diisi nama perusahaan yang mendapat penundaan.
- Nomor (8) : Diisi tanggal jatuh tempo penangguhan pembayaran.
- Nomor (9) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu penundaan
- Nomor (10) : Diisi sesuai judul keputusan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal dengan kalkulasi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (12) : Diisi Direktur Fasilitas Kepabeanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau Kepala Kantor Pabean tempat permohonan pembebasan atau keringanan diajukan (dipilih instansi yang menerbitkan fasilitas).
- Nomor (13) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean penerbit keputusan penundaan, dalam hal importasi melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (14) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Menteri Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN
JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN(2).....

CATATAN PENUNDAAN
Periode :

No.	Nama Importir	Keputusan Penundaan			Jaminan	Dokumen Pemberitahuan Pabean Impor	Jumlah dan Jenis Barang	Perpanjangan Keputusan Penundaan			Perpanjangan Jaminan	Penyelesaian
		Nomor	Tanggal	Jangka Waktu				Nomor	Tanggal	Jangka Waktu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



